



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 2 September 2021
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA

Fadli Ali Taslim¹ , Rheza Pratama²

*Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unoversitas Khairun¹²
fadlitaslim207@gmail.com¹ rhezakonoras@gmail.com²*

Info Artikel :

Diterima : 9 September 2021

Disetujui : 17 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

Kata Kunci :

Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dari Baban Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Rasio Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan Rasio Efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

Keywords :
Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Human Development Index (HDI).

This study aims to determine the effect of the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio on the Human Development Index (HDI). The population used in this study were 10 districts/cities of North Maluku province using purposive sampling method. The type of data collected is secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Financial and Asset Management Agency (FAMA) of North Maluku Province. In this study using panel data regression analysis tool.

The results of this study indicate that the Independence Ratio has a significant negative effect on the human development index, the PAD Effectiveness Ratio has a significant negative effect on the human development index and the Efficiency Ratio has a significant negative effect on the human development index..

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah khususnya pembangunan manusia dapat dilihat seberapa besar permasalahan yang terjadi dan paling mendasar di masyarakat yang dapat diatasi. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas-tugas yang perlu dijalankan. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia tergantung pada pemerintah yang sebagai penyedia sarana penunjang.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam hal membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik yaitu pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Untuk membiayai semua itu pemerintah daerah sangat bergantung pada penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Dana lainnya. Pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah biasanya digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan hal itu akan terjadi jika alokasi dana tepat sasaran yaitu alokasi dana yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menilai kinerja dari pemerintah daerah. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai indikator yang mengukur kualitas untuk sumber daya manusia agar mencapai taraf kesejahteraan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan pada suatu daerah tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah yang diwujudkan melalui alokasi anggaran pada sektor-sektor yang dapat membantu pembangunan manusia.

Tabel 1. 1
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Halmahera Barat	62,97	63,83	64,19	64,54	65,34
Halmahera Tengah	62,07	63,05	63,89	64,66	65,55
Kepulauan Sula	60,50	61,25	62,04	62,96	63,64
Halmahera Selatan	61,26	62,17	62,64	63,39	64,11
Halmahera Utara	65,04	66,02	66,52	67,30	67,75
Halmahera Timur	63,99	64,92	65,77	66,20	66,74
Pulau Morotai	59,27	59,87	60,71	61,39	62,38
Pulau Taliabu	58,26	58,66	59,03	59,67	60,62
Kota Ternate	77,64	77,80	78,48	79,13	80,03
Kota Tidore Kepulauan	67,45	68,37	69,25	68,89	70,83
Maluku Utara	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,93

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Pada tabel 1.1 Terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara cenderung mengalami peningkatan dari 65,91 pada tahun 2015 menjadi 68,70 pada tahun 2019. Walaupun IPM Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih ada beberapa daerah yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi. Selain itu, jika dibandingkan dengan IIPM Nasional IPM Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

Utara masih berada di bawah IPM Nasional. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa IPM Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara belum mampu mencapai peningkatan IPM yang maksimal karena masih berada di bawah IPM nasional.

Dengan meningkatkan PAD yang diterima serta pemberian dana perimbangan yang lebih besar kepada daerah dari pemerintah pusat maka hal ini dapat mendorong peningkatan lanjutan terhadap IPM daerah dan apabila penerimaan dana dialokasikan terhadap belanja langsung yang bersentuhan langsung terhadap komponen IPM. Belum tercapainya target pemerintah berimplikasi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan sampai saat ini belum juga sepenuhnya berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2008).

Provinsi Maluku Utara masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup rendah. Hal tersebut terjadi karena permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target saat direalisasikan menjadi pertanyaan untuk pemerintah daerah agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun atau tidak memenuhi target. Pemerintah daerah diminta untuk lebih meningkatkan OPD untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sistem manajemen pengelolaan PAD dengan melakukan penyegaran pada OPD agar pengelolaan keuangan PAD dapat dipungut dan diretribusi dengan bijak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dibanding daerah lainnya disebabkan karena minimnya SDM dalam pengelolaan PAD, penetapan target dan pengelolaan PAD yang belum profesional serta lemahnya pengawasan yang membuat tingkat kebocoran yang tinggi.

Berbagai penelitian mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa penelitian antara lain Anim Rahmayati (2016) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013, dengan menggunakan metode rasio. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal namun dalam pengelolaan keuangan PAD sudah efektif dan efisien akan tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah serta penggunaan dana yang belum sesuai sebab dananya digunakan kebanyakan untuk belanja operasi dibanding belanja modal.

Tika Anggraini dan Sutaryo (2016) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia” dengan menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap IPM dan empat variabel lainnya yaitu Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas pajak tidak berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan MENGUJI DAN MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA”

KAJIAN TEORI

Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism)

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintahan federalisme fiskal adalah sebuah struktur dari tingkatan pemerintah yang masing-masing mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai

tanggung jawab. Jadi federalisme fiskal sendiri merupakan sebuah perangkat prinsip pedoman yang diterapkan di sebuah negara ataupun daerah untuk merancang keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah. Dalam konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pada pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di dalam beberapa negara bagian yang berbentuk federal di mana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetya, 2013).

Teori Federalisme Fiskal (fiscal federalism) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Shah dan Thompson, 2002).

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara. Waktu penelitian dimulai bulan September 2020.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Sampel merupakan sebagian karakteristik yang dimiliki dari populasi tertentu atau dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara selama 5 tahun dari 2015-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berasal dari studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan media online atau berbagai sumber lainnya yang bersifat tertulis. Studi pustaka dapat berasal dari jurnal, buku, artikel ataupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang didokumentasikan oleh perusahaan seperti laporan keuangan (annual report) dari perusahaan tersebut.

Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara dari Kabupaten/Kota yang ada selama lima tahun dari periode 2015-2019. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari annual report (Laporan Keuangan Daerah) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang didapat melalui instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara.

Metode Analisis

Uji regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*, *Rasio Efektivitas PAD*, dan *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah* terhadap variabel dependen *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*.

Model regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + e$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β = Konstan

X1 = Kemandirian Keuangan Daerah

X2 = Efektivitas PAD

X3 = Efisiensi Keuangan Daerah

e = Error

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4.1
Penentuan Jumlah Sampel dan Observasi

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten yang ada pada Provinsi Maluku Utara	8
2.	Kota yang ada pada Provinsi Maluku Utara	2
Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai sampel		10
Jumlah data yang digunakan sebagai sampel pada tahun 2015-2019 (10 x 5)		50

Statistik Deskriptif

Tabel 4.2.1
Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	65.24060	7.063800	84.19860	164.3582
Median	64.05000	3.845000	84.25500	151.6250
Maximum	80.03000	89.12000	320.1600	491.2200
Minimum	58.26000	0.180000	8.480000	7.630000
Std. Dev.	5.348416	12.60331	47.23500	102.0245
Observations	50	50	50	50

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

Kemandirian Keuangan Daerah memiliki rata-rata (*Mean*) sebesar 7.06 artinya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara periode 2015-2019 memiliki kemampuan dalam membiayai dan melaksanakan kegiatan pemerintahan daerahnya masih sangat rendah yang masuk pada pola hubungan intruksi dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Nilai standar deviasi sebesar 12,60 dan nilai tengah (*median*) sebesar 38,45 yang terletak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Untuk nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,18 yang diperoleh Kabupaten/Kota Halmahera Timur tahun 2016 dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 89,12 yang diperoleh Kabupaten/Kota Pulau Morotai tahun 2017.

Rasio Efektivitas PAD memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 84,19 dimana, Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara selama periode 2015-2019 memiliki kemampuan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan untuk mencapai target yaitu cukup efektif. Untuk nilai standar deviasi sebesar 472,35 dan nilai tengah (*median*) sebesar 842,55 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Nilai terendah (*minimum*) sebesar 8,48 diperoleh pada Kabupaten/Kota Pulau Taliabu tahun 2019 yang masuk pada kriteria tidak efektif dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 320,16 diperoleh Kabupaten/Kota Pulau Taliabu tahun 2017 pada kriteria sangat efektif.

Rasio Efisiensi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 164,35 artinya Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara selama periode 2015-2019 memiliki kemampuan mendapatkan pendapatan yang telah direalisasikan dari pendapatan yang diterima yaitu tidak efisien. Nilai standar deviasi sebesar 102,02 dan nilai tengah (*median*) sebesar 151,62 pada Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Nilai terendah (*minimum*) Rasio Efisiensi sebesar 7,63 yang diperoleh Kabupaten/Kota Halmahera Timur tahun 2015 yang masuk kriteria sangat efisien dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 491,22 tahun 2016 pada Kabupaten/Kota Pulau Morotai dan masuk pada kriteria tidak efisien.

Tabel 4.2.2
Ringkasan Deskriptif Variabel

No.	Rasio	Indikator	Kabupaten/Kota	Kriteria
1.	KKD	Tertinggi (89,12%) Terendah (0,18%)	Pulau Morotai (2017) Halmahera Timur (2016)	Delegatif (75% -100%) Intruksi (0% - 25%)
2.	Efektivitas	Tertinggi (320,16%) Terendah (8,48%)	Pulau Taliabu (2017) Pulau Taliabu (2019)	Sangat Efektif (>100%) Tidak Efektif (<60%)
3.	Efisiensi	Tertinggi (491,22%) Terendah (7,63%)	Pulau Taliabu (2017) Halmahera Timur (2015)	Tidak Efisien (>100%) Sangat Efisien (<60%)

Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis X_1

Hasil pengujian hipotesis pertama menyebutkan bahwa X_1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, diperoleh t-statistik sebesar -1.943218 dan probabilitas sebesar 0.0565 lebih kecil dari nilai signifikan 0.1 atau ($0.0565 < 0.1$). Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara keseluruhan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil Pengujian Hipotesis X_2

Hasil pengujian kedua menyebutkan bahwa X_2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, dapat dilihat bahwa nilai t-statistik sebesar -2.580900 dan probabilitas sebesar 0.0140 lebih kecil dari nilai signifikan 0.1 atau ($0.0140 < 0.1$). ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Rasio Efektifitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Hasil Pengujian Hipotesis X_3

Hasil pengujian ketiga menyebutkan bahwa X_3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, dapat dilihat nilai t-statistik sebesar -3.278608 dan probabilitas sebesar 0.0023 lebih kecil dari nilai signifikan 0.1 atau ($0.0023 < 0.1$) ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Rasio Efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap IPM

Hasil pengujian untuk variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai pada tabel uji t-statistik sebesar -1.969218 dan probabilitas sebesar 0,056 atau ($0,0565 < 0,1$). Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febri Nur Gita Sari (2020) yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan penelitian tersebut di Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 untuk Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai rata-rata sebesar 7,06% masuk pada kriteria "*Sangat Rendah*" antara 0% - 25% atau pada indikator "*Intruksi*".

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil pengujian untuk variabel kedua yaitu Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh Zul Hendri dkk (2020) yang mengemukakan bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan penelitian tersebut di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh nilai t-statistik sebesar -2.580900 dan probabilitas sebesar 0.0140 lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,1 atau ($0,0140 < 0,1$) artinya Rasio Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal suatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik, pemerintahan daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Anggaran PAD. Rasio Efektivitas PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sebesar 84,20% yang masuk pada kriteria "*Cukup Efektif*" antara 80% -90%.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil pengujian untuk variabel ketiga yaitu Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yang berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh Eka Marisca Harliyani dkk (2016) menyatakan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan hasil uji yang di peroleh -3.278608 dan probabilitas sebesar 0.0023 dimana lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,1 atau ($0,0023 < 0,1$). Hubungan yang negatif dan signifikan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat efisiensi keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan IPM juga baik.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal disuatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik, pemerintahan daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Tercapainya pemerintahan yang efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% hal tersebut berarti semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini untuk Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sebesar 164,36% dan masuk pada kriteria Efisiensi “*Tidak Efisien*” karena berada pada (>100%).

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analisis Data terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

1. Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Dan Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 menunjukkan kategori “*Sangat Rendah*” atau “*Intruksi*” dengan nilai rata-rata sebesar 5,40% yang berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara belum mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima karena peran pemerintah pusat masih dominan dibandingkan kemandirian dari pemerintah daerah itu sendiri.
2. Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 sebesar 75,39% dan masuk pada kategori “*Kurang Efektif*” dengan tingkat efektivitas PAD diantara 60% - 80%. Rasio efektivitas jika nilai semakin tinggi maka tingkat efektivitas di daerah tersebut akan semakin baik dan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia yang baik juga.

Hasil pengujian Rasio Efisiensi yang menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Dilihat pada hasil hipotesis yang mengatakan nilai t-statistik pada tabel *fixed effect* bernilai negatif sebesar -3.278608 dan signifikan artinya Rasio Efisiensi dengan IPM memiliki hubungan negatif signifikan dan berpengaruh terhadap IPM. Semakin rendah tingkat efisiensi keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan IPM juga baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisza, S., Alfi, F., & Nuraini, I. (2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Analisis Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Pendahuluan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto merupakan syarat yang diperlukan dalam meningk. 2(2000).*
- Astuti, S., & Mispriyanti. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Fintech Dan E-Commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Dan Industri Kreatif.*
- Baihaqi. (2012). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Daerah Pada Kabupaten Bengkulu Tengah. *Fairness..*

- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*.
- Dewi, P., & Sutrisna, I. (2015). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Dinas, D. I., Dan, K., Kota, U., & Mulyaningtyas, A. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 39–52. <https://doi.org/10.14710/jaa.v12i1.13857>
- Dini, L., & Dwiandari, Y. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia*.
- Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Oleh : Muhammad Irfan Hanif Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. (2018).
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A., & Perdana. (2018). Manajemen Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. *The Winners*, 16(2), 152. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Habibah, N. (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013*.
- Hamid, A. A., & Sekuritas, J. (2018). Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka - Jawa Barat.
- Harliyani, E. M. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi*.
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Juliarini, A. (2018). *Kinerja pendapatan daerah terhadap indeks pembangunan manusia studi kasus provinsi di pulau jawa*.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>
- Memperoleh, U., & Sarjana, G. (2017). *Pengaruh kelengkapan laporan keuangan dan fiscal stress terhadap indeks pembangunan manusia dengan kinerja keuangan daerah sebagai pemediasi*.

- Mone.dkk. (2013). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Akuntansi*.
- Muhammad Yusuf Sholeh Sudjjana, Jajuk Herawati, D. S. (2019). JURNAL SIMPLEX Vol. 2 No. 3 Desember 2019. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Iklim Inovasi, Efikasi Diri Terhadap Kreativitas Karyawan Pada Industri Pembuatan Gerabah Di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul*, 2(3), 24–34.
- Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang*, 3(1), 111–117.